



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM
Bupati Sumedang



ARAHAN BUPATI SUMEDANG

Pada Pelaksanaan Konsultasi Publik Ranwal RPJMD 2025-2029
serta Musrenbang RKPD 2026

Sumedang, 15 April 2025

PERAN KUNCI KEPALA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN



TUGAS KEPALA DAERAH*

- memimpin Pemerintahan Daerah
- memelihara ketenteraman dan ketertiban
- menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD
- menyusun APBD, perubahan APBD, & pertanggungjawaban APBD
- mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan
- mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERAN KEPALA DAERAH

- 1 Kepemimpinan yang efektif dan transformatif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
- 2 Reformasi keuangan daerah agar prudent, efektif, efisien, dan taat asas:



Efisiensi Belanja Daerah

1. Momentum reformasi dan *baseline* pengelolaan keuangan daerah
2. Belanja birokrasi dan administrasi dialihkan kepada belanja produktif
3. Hasil efisiensi sebagai tambahan *fiscal space* bagi Kepala Daerah dalam mewujudkan visi misi



Optimalisasi Pendapatan Daerah

1. Pajak & Retribusi (termasuk pemanfaatan aset) dengan tetap menjaga perekonomian dan akses layanan publik
2. Sumber non pungutan, a.l. optimalisasi BUMD, BLUD, atau kerja sama dengan badan usaha



Mendorong pemanfaatan pembiayaan daerah secara *prudent*

a.l. pinjaman daerah, sukuk daerah, obligasi daerah, dan KPBU



- 3 Menjaga kondusivitas daerah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan



- 4 Inovasi, kolaborasi, dan sinergi untuk menjawab tantangan nyata di daerah

Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait

Reformasi Birokrasi



Responsivitas Birokrasi

Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat



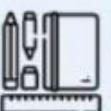
Percepatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif



Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan swasembada pangan serta energi.



Efektivitas Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat



Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran



Pengelolaan ASN

Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi



Pelayanan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar



Reformasi Pelayanan Publik

Pembentahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat

KEPALA DAERAH MERUPAKAN PEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI KUNCI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

Kepala daerah merupakan pemimpin birokrasi di daerah untuk terus meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.



VISIONING

Menciptakan visi, membuat pemahaman yang sama akan tujuan dari reformasi birokrasi



STRUCTURING

Mengatur dan merancang reformasi birokrasi secara menyeluruh (kebijakan, SDM, anggaran, dll)



INTEGRATING

Menciptakan keterpaduan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi; membangun kerjasama antar perangkat daerah, komitmen pegawai dan budaya kerja yang positif.



MONITORING

Pemantauan dan memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana.

Dampak kesuksesan Kepala Daerah dalam Reformasi Birokrasi



Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Ekonomi yang terus tumbuh bersama dengan pemerataan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat



Pelayanan Publik yang Berkualitas

Kualitas pelayanan kepada masyarakat akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah



Stabilitas Politik dan Sosial

Stabilitas politik dan sosial akan mempermudah pengembangan bisnis dan meningkatkan kepuasan rakyat

Regulasi yang Efektif dan Jelas

Regulasi yang tidak berbelit dan jaminan kejelasan dalam perizinan akan mempermudah investasi



Sinergi Pusat dan Daerah

Keterhubungan program dan kolaborasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah akan berdampak pada pencapaian pembangunan yang optimal.

Disarikan dari: Ford et al, 2021



VISI RPJMD KABUPATEN SUMEDANG 2025-2029

"SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

SEJAHTERA

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata

AGAMIS :

Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya.

MAJU :

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya

PROFESIONAL :

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan.

KREATIF :

Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi

SEMAKIN MAJU:

Sebuah kondisi Pembangunan daerah yang telah menjadikan dasar capaian dalam 5 tahun kepemimpinan sebelumnya sebagai komitmen kuat untuk **"memelihara hasil Pembangunan, menyempurnakan kesejahteraan dan melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup**

REFORMULASI 9 MISI MENJADI 5 MISI

MISI VERSI PENDAFTARAN KPU		KEYWORD	RUMUSAN MISI BARU HASIL REFORMULASI	
1	Mewujudkan nilai-nilai religius, taat hukum dan demokratis untuk menciptakan generasi emas yang produktif, unggul dan maju	Religius, taat hukum, demokratis, unggul	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter (1 & 9)
2	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang jujur, akuntabel, bebas korupsi dan inovatif berbasis teknologi digital	Profesionalitas ASN	2	Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif (2)
3	Mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dasar, pengembangan wilayah dan pembangunan kawasan industri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Infrastruktur Dasar dan konektivitas	3	Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan (3)
4	Memperluas kesempatan kerja dan penambahan keterampilan bagi generasi muda untuk mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengangguran (4) dan Kemiskinan (5)	4	Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (3,4,5, 6 & 9)
5	Meningkatkan produktifitas pertanian, merevitalisasi irigasi, mendukung mekanisasi alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian, serta mengimplementasikan performa agrarian guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	Ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	5	Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial (7,8)
6	Mempercepat pembangunan sektor industri dan perdagangan guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha terutama UMKM, melalui revitalisasi pasar tradisional, pembangunan pasar induk, fasilitasi bantuan teknologi produksi dan pemasaran serta permodalan	Industri, Perdagangan, UMKM		
7	Peningkatan bantuan keuangan desa yang merata serta mengoptimalkan insentif bagi RT/RW, PKK, BPD, Guru Ngaji, Guru Honorer, Guru Paud, Da'i-Da'iyah, Kader Posyandu, Linmas, bantuan pesantren dan masjid serta apresiasi yang berprestasi	Kelembagaan sosial, Modal sosial, insentif	5	Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial (7,8)
8	Meningkatkan efektivitas program inklusif pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ibu hamil dan mendorong terbentuknya pelayanan lansia (Geriatri), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Gender, inklusifitas, Perlindungan Perempuan & anak		
9	Memperkuat peran pelaku seni budaya, kelompok kreatif dan komunitas seni tradisi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kekayaan alam dan kebudayaan dalam rangka implementasi SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda)	Budaya (1), pariwisata (4)		

VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN





SUMEDANG
The City of Knowledge

TERIMA KASIH